



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAJUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 490482

II. DATA HARTA

- | | | |
|---|------------|--------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 960.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/117 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000 | | |
| 2. Tanah Seluas 17700 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 215.000.000 | | |
| 3. Tanah Seluas 13660 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BESAR, WARISAN Rp. 110.000.000 | | |
| 4. Tanah Seluas 12790 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BESAR, WARISAN Rp. 110.000.000 | | |
| 5. Tanah Seluas 2641 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BESAR, WARISAN Rp. 35.000.000 | | |
| 6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/72 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 17.000.000 |
| 1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000 | | |
| 2. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 37.260.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 9.400.000 |



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

1.023.660.000

III. HUTANG

Rp.

210.542.077

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

813.117.923

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.